



Standar Global

Untuk Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Sosial





CC BY-NC-ND

© **Komisi Asosiasi Internasional Sekolah Pekerjaan Sosial Federasi Internasional Pekerja Sosial - Pendidikan Interim**

2020

Anda dapat membagikan konten laporan ini dengan ketentuan berikut:

Atribusi - Anda harus memberikan kredit yang sesuai, memberikan tautan ke lisensi, dan menunjukkan jika ada perubahan. Anda dapat melakukannya dengan cara yang wajar, tetapi tidak dengan cara apa pun yang menunjukkan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda atau penggunaan Anda.

Non-Komersial - Anda tidak boleh menggunakan materi untuk tujuan komersial.

Dilarang membuat turunan - Jika Anda menggubah, mengubah, atau membangun materi, Anda tidak boleh mendistribusikan materi yang telah dimodifikasi.

Tidak ada pembatasan tambahan - Anda tidak boleh menerapkan ketentuan hukum atau tindakan teknologi yang secara hukum membatasi orang lain untuk melakukan apa pun yang diizinkan oleh lisensi.

Daftar Isi

Pembukaan	5
Dasar pemikiran	6
Sekolah	8
1. Misi Inti, Tujuan dan Sasaran.	8
2. Sumber Daya dan Fasilitas	9
3. Kurikulum	10
4. Kurikulum Inti	11
<i>Pekerjaan Sosial Dalam Konteks</i>	11
<i>Pekerjaan Sosial dalam Praktik</i>	12
<i>Praktik Lapangan (Penempatan)</i>	13
5. Kegiatan Penelitian dan Keilmuan	14
Orang	15
1. Pendidik	15
2. Mahasiswa	16
3. Pengguna Layanan	17
Profesi	18
1. Pemahaman bersama tentang Profesi	18
2. Etika dan Nilai-nilai	18
3. Kesetaraan dan Keragaman	19
4. Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan	19

Anggota Gugus Tugas Gabungan

IASSW Global Standards Taskforce	IFSW Interim Education
<p>Chair: Dixon Sookraj</p> <p>Members:</p> <p>Carmen Castillo (COSTA RICA): Member, Latin American Rep.</p> <p>Karene Nathaniel-DeCaires (TRINIDAD & TOBAGO): Member, North American/Caribbean Rep.</p> <p>Liu Meng (CHINA): Member, China National Rep.</p> <p>Teresa Francesca Bertotti (ITALY): Member, European Association Rep.</p> <p>Alexandre Hakizamunga (RWANDA): Member, African Association Rep.</p> <p>Vimla Nadkarni (INDIA): Member, Past IAASW President</p> <p>Emily Taylor (CANADA): Student Rep.</p> <p>Ute Straub (GERMANY): IAASW Co-Chair & Board Representative</p> <p>Consultants:</p> <p>Carol S. Cohen (USA): Commission on Group Work in Social Work Education of the International Association for Social Work with Groups, Co-Chair.</p> <p>Shirley Gatenio Gabel (USA). Journal of Human Rights and Social Work, Co-Editor</p> <p>Varoshini Nadesan (SOUTH AFRICA). Association of South African Social Work Education Institutions, President.</p>	<p>Chair: Vasilios Ioakimidis</p> <p>Members:</p> <p>African Regional Commissioners: Lawrence Mukuka and Zena Mnasi</p> <p>Asia and Pacific Regional Commissioner: Mariko Kimura</p> <p>European Regional Commissioner: Nicolai Paulsen</p> <p>Latin American and Caribbean Regional Commissioner: Marinilda Rivera Díaz</p> <p>North American Regional Commissioners: Dr. Joan Davis-Whelan and Dr. Gary Bailey</p>
 <p>IASSW AIETS</p>	 <p>IFSW</p>

Pembukaan

Asosiasi Internasional Sekolah Pekerjaan Sosial (IASSW) dan Federasi Internasional Pekerja Sosial (IFSW) telah bersama-sama memperbarui Standar Global untuk Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Sosial. Versi sebelumnya dari dokumen Standar Global untuk Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Sosial telah diadopsi oleh kedua organisasi tersebut di Adelaide, Australia pada tahun 2004. Antara tahun 2004 dan 2019, dokumen tersebut berfungsi sebagai panduan aspiratif yang menetapkan standar keunggulan dalam pendidikan pekerjaan sosial.

Dengan diadopsinya Definisi Global Pekerjaan Sosial yang baru pada bulan Juli 2014, dan diterbitkannya Pernyataan Prinsip-prinsip Etika Pekerjaan Sosial Global yang diperbarui pada tahun 2019, maka dokumen Standar Global untuk Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Sosial perlu diperbaharui untuk mengintegrasikan perubahan-perubahan yang terjadi pada kedua dokumen tersebut serta untuk merefleksikan perkembangan terkini dalam pekerjaan sosial global.

Untuk mencapai tujuan ini, kedua organisasi tersebut membentuk sebuah kelompok kerja bersama yang terdiri dari Gugus Tugas Standar Global IASSW dan Komisi Pendidikan Global Interim IFSW. Kelompok tugas ini terlibat dengan komunitas pekerjaan sosial global melalui konsultasi yang ketat yang berlangsung selama lebih dari 18 bulan dan mencakup umpan balik dari 125 negara yang diwakili oleh 5 Asosiasi Regional dan sekitar 400 Universitas dan Organisasi Pendidikan Tinggi. Selain itu, anggota gugus tugas bersama memfasilitasi dua seminar internasional yang melibatkan perwakilan pengguna layanan. Oleh karena itu, kami yakin bahwa dokumen ini merupakan hasil dari sebuah proses yang dinamis dan kolektif. Dokumen ini juga merupakan puncak dari eksplorasi yang ketat terhadap dilema epistemologi, politik, etika dan budaya.

Tujuan utama dari Standar Global adalah untuk:

- Memastikan konsistensi dalam penyediaan pendidikan pekerjaan sosial dengan tetap menghargai dan mengapresiasi keberbagaian, kesetaraan, dan inklusi.
- Memastikan bahwa pendidikan Pekerjaan Sosial mematuhi nilai-nilai dan kebijakan profesi sebagaimana diartikulasikan oleh IASSW dan IFSW.
- Mendukung dan melindungi staf, siswa, dan pengguna layanan yang terlibat dalam proses pendidikan.
- Memastikan bahwa generasi pekerja sosial berikutnya memiliki akses terhadap pembelajaran berkualitas tinggi, peluang yang juga menggabungkan pengetahuan pekerjaan sosial yang berasal dari penelitian, pengalaman, kebijakan, dan praktik.
- Memupuk semangat kolaborasi dan transfer pengetahuan antara berbagai sekolah pekerjaan sosial dan antara pendidikan, praktik, dan penelitian pekerjaan sosial.
- Mendukung sekolah-sekolah pekerjaan sosial untuk menjadi lingkungan belajar mengajar yang berkembang, memiliki sumber daya yang memadai, inklusif, dan partisipatif.

Sementara menghargai tujuan yang menyeluruh, kami juga menyadari fakta bahwa pengalaman pendidikan dan kerangka kerja kebijakan di berbagai negara sangat bervariasi. Standar Global bertujuan untuk menangkap universalitas nilai-nilai pekerjaan sosial dan keragaman yang menjadi ciri khas profesi ini melalui artikulasi seperangkat standar yang dibagi antara wajib (yang harus dipatuhi oleh semua program) dan aspiratif (standar-standar yang seharusnya dicita-citakan oleh sekolah kapan dan di mana saja mereka berada). Standar wajib mewakili elemen-elemen dasar, yang sebagian dimaksudkan untuk mendorong konsistensi dalam pendidikan pekerjaan sosial di seluruh dunia.

Profesor Dixon Sookraj
Profesor Vasilios Ioakimidis

Dasar pemikiran

Kami mempertimbangkan realitas pekerjaan sosial di seluruh dunia berikut ini dalam mengembangkan standar-standar di bawah:

1. Keragaman konteks historis, sosial-budaya, ekonomi dan politik di mana pekerjaan sosial dipraktikkan, baik di dalam negara maupun di seluruh dunia.
2. Keragaman praktik menurut: 1) setting praktik (misalnya pemerintah, LSM, kesehatan, pendidikan, lembaga layanan anak dan keluarga, lembaga pemasyarakatan, organisasi berbasis masyarakat lainnya, dan pengaturan praktik swasta); 2) bidang atau wilayah praktik (misalnya populasi yang dilayani, jenis masalah pribadi dan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang ditangani); dan 3) teori, metode, teknik, dan keterampilan praktik yang mewakili praktik di berbagai tingkatan - individu, pasangan/keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, masyarakat yang lebih luas, dan internasional (misalnya tingkat mikro, mezzo, dan makro).
3. Keragaman struktur dan metode penyampaian pendidikan pekerjaan sosial. Pendidikan pekerjaan sosial bervariasi dalam hal posisinya di dalam struktur lembaga pendidikan (misalnya, unit, departemen, sekolah, dan fakultas). Beberapa program pendidikan pekerjaan sosial disejajarkan dengan disiplin ilmu lain, seperti ekonomi dan sosiologi, dan beberapa lainnya merupakan bagian dari pengelompokan profesional yang lebih luas seperti kesehatan atau pembangunan. Selain itu, tingkat, sikap terhadap, dan integrasi pendidikan jarak jauh dan pembelajaran online sangat bervariasi di antara program-program tersebut.
4. Keragaman sumber daya yang tersedia untuk mendukung pendidikan pekerjaan sosial, termasuk para pendidik dan direktur pekerjaan sosial di seluruh dunia.
5. Keragaman tingkat perkembangan profesi pekerjaan sosial di seluruh dunia. Di banyak negara, profesi ini merupakan profesi yang mapan yang didukung oleh undang-undang dan badan pengatur serta kode etik yang menyertainya. Gelar sarjana muda pekerjaan sosial yang diakui sering kali merupakan persyaratan pendidikan minimum untuk praktik profesional. Mekanisme ini berfungsi sebagian untuk melindungi penggunaan gelar 'pekerja sosial', mendefinisikan ruang lingkup praktik (apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam praktiknya), memastikan bahwa para praktisi mempertahankan kompetensi dan melindungi masyarakat dari bahaya yang dilakukan oleh para pekerja sosial. Di negara lain, pekerjaan sosial memiliki bentuk yang berbeda. Program pendidikan pekerjaan sosial dapat ditambahkan ke dalam kurikulum yang sudah ada, bukan berdiri sebagai unit akademis yang terpisah. Bentuknya bisa berupa penawaran mata kuliah individual, program sertifikat satu tahun, hingga program diploma dua tahun. Standar kurikulum yang disajikan dalam dokumen ini berlaku terutama untuk program gelar pekerjaan sosial. Program sertifikat dan gelar yang lebih pendek dapat menggunakan standar tersebut, tetapi mungkin tidak dapat memasukkan semua standar.
6. Dampak buruk dari penjajahan dan imperialisme pendidikan terhadap perkembangan pekerjaan sosial di Dunia Selatan. Kami percaya dan berpendirian teguh bahwa perspektif teoritis dan metode praktik, teknik dan keterampilan yang dikembangkan di Dunia Utara tidak boleh dibawa ke Dunia Selatan tanpa pemeriksaan kritis terhadap kesesuaian dan potensi efektivitasnya untuk konteks lokal.
7. Semakin banyaknya isu dan tantangan umum yang mempengaruhi pendidikan dan praktik pekerjaan sosial di seluruh dunia. Hal ini termasuk meningkatnya ketidaksetaraan yang disebabkan oleh globalisasi neoliberal, perubahan iklim, bencana alam dan manusia, korupsi dan

konflik ekonomi dan politik.

8. Banyak perkembangan dan inovasi baru, terutama yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, yang terjadi di Dunia Selatan. Oleh karena itu, menghubungkan global dan lokal dalam kurikulum akan memperkuat persiapan akademis para pekerja sosial di mana pun; hal ini akan memfasilitasi penilaian untuk transferabilitas pendidikan pekerjaan sosial di seluruh yurisdiksi, termasuk perbatasan internasional; hal ini juga akan membantu memperkuat identitas profesional mahasiswa sebagai anggota profesi global.
9. Terakhir, kontribusi spesialisasi kurikulum terhadap fragmentasi dalam pendidikan dan praktik. Terlepas dari bidang spesialisasi yang diberikan dalam kurikulum, program ini harus mempersiapkan siswa untuk memahami keterkaitan praktik di semua tingkatan - individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dll. (yaitu mikro, mezzo, makro). Pemahaman yang lebih luas ini akan membantu mahasiswa menjadi praktisi yang kritis, beretika, dan kompeten.

Versi Standar Global ini disusun berdasarkan tiga domain menyeluruh yang mencakup elemen- elemen yang berbeda namun saling terkait dalam pendidikan Pekerjaan Sosial: **Sekolah, Orang dan Profesi**



Sekolah

Pendidikan Pekerjaan Sosial secara historis telah disampaikan oleh berbagai organisasi yang luas dan berbagai, termasuk Universitas, Sekolah Tinggi, Perguruan Tinggi, Pendidikan Lanjutan dan Pendidikan Tinggi - publik, swasta dan nirlaba. Terlepas dari keragaman modalitas penyelenggaraan pendidikan, struktur organisasi dan keuangan, ada harapan bahwa sekolah dan program pekerjaan sosial secara resmi diakui oleh otoritas pendidikan dan/atau regulator yang sesuai di setiap negara. Pendidikan Pekerjaan Sosial adalah kegiatan yang kompleks dan menuntut yang membutuhkan akses ke sumber daya yang memadai, pendidik, strategi yang transparan, dan peningkatan kurikulum terkini.

1. Misi Inti, Tujuan dan Sasaran.

Semua Program Pekerjaan Sosial harus mengembangkan dan menyebarkan pernyataan tujuan inti atau pernyataan misi yang:

- a. Diartikulasikan dengan jelas, dapat diakses dan mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika pekerjaan sosial.
- b. Konsisten dengan definisi dan tujuan global pekerjaan sosial
- c. Menghormati hak-hak dan kepentingan orang-orang yang terlibat dalam semua aspek penyampaian program dan layanan (termasuk siswa, pendidik, dan pengguna layanan).

Jika memungkinkan, sekolah harus beraspirasi untuk tinggi:

- d. Mengartikulasikan strategi yang luas untuk berkontribusi pada kemajuan profesi Pekerjaan Sosial dan pemberdayaan masyarakat di mana sekolah berusaha untuk beroperasi (secara lokal, nasional dan internasional).

Sehubungan dengan tujuan program dan hasil yang diharapkan, sekolah harus dapat menunjukkan bagaimana mereka telah memenuhi persyaratan berikut:

- e. Spesifikasi tujuan program dan hasil pendidikan tinggi yang diharapkan.
- f. Identifikasi metode instruksional programnya yang mendukung pencapaian perkembangan kognitif dan afektif mahasiswa pekerjaan sosial.
- g. Kurikulum yang mencerminkan pengetahuan inti, proses, nilai, dan keterampilan dari profesi pekerjaan sosial, sebagaimana diterapkan dalam realitas yang sesuai dengan konteksnya.
- h. Mahasiswa Pekerjaan Sosial yang mencapai tingkat kemahiran awal sehubungan dengan penggunaan reflektif diri atas nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan pekerjaan sosial.
- i. Rancangan kurikulum yang memperhitungkan dampak dari interaksi faktor budaya, politik, ekonomi, komunikasi, kesehatan, psikososial, dan lingkungan global.
- j. Program ini memenuhi persyaratan tujuan profesional yang ditetapkan secara nasional dan/atau regional/internasional
- k. Program ini membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal, nasional dan/atau regional/internasional.

- l. Penyediaan persiapan pendidikan yang relevan untuk memulai intervensi praktik pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok dan/atau komunitas (fungsional dan geografis) yang dapat disesuaikan dengan berbagai konteks.
- m. Penggunaan metode pekerjaan sosial yang didasarkan pada bukti yang kuat mengenai keefektifan intervensi jika memungkinkan, dan selalu mengedepankan martabat dan rasa hormat.
- n. Tata kelola, dukungan administratif, struktur fisik dan sumber daya terkait yang memadai untuk melaksanakan program.
- o. Pemberian kualifikasi pekerjaan sosial yang khas pada tingkat sertifikat, diploma, sarjana pertama, atau pascasarjana, sebagaimana disetujui oleh otoritas kualifikasi nasional dan/atau regional, di mana otoritas tersebut ada.

Untuk lebih memperkaya misi dan tujuan mereka, sekolah harus beraspirasi untuk:

- p. Evaluasi oleh sejawat eksternal terhadap program sejauh yang wajar dan layak secara finansial. Hal ini dapat mencakup peninjauan oleh sejawat eksternal atas tugas dan/atau ujian tertulis dan disertai, serta tinjauan sejawat eksternal dan penilaian kurikulum.
- q. Evaluasi oleh konstituen program pendidikan untuk menilai sejauh mana tujuan program dan hasil yang diharapkan tercapai.

2. Sumber Daya dan Fasilitas

Berkenaan dengan struktur, administrasi, tata kelola dan sumber daya, sekolah dan/atau badan yang ditunjuk sebagai penyedia pendidikan *harus* memastikan hal-hal berikut:

- a. Program-program pekerjaan sosial bersifat independen dari disiplin ilmu lain dan oleh karena itu harus dilaksanakan melalui unit yang berbeda yang dikenal sebagai Fakultas, Sekolah, Departemen, Pusat atau Divisi, yang memiliki identitas yang jelas di dalam institusi pendidikan.
- b. Sekolah memiliki Kepala atau Direktur¹ yang ditunjuk karena telah menunjukkan kompetensi administratif, keilmuan, dan profesional, lebih disukai dalam profesi pekerjaan sosial.
- c. Kepala atau Direktur memiliki tanggung jawab utama untuk koordinasi dan kepemimpinan profesional sekolah, dengan waktu dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi tanggung jawab ini.
- d. Alokasi anggaran program pekerjaan sosial cukup untuk mencapai tujuan inti atau misi dan sasaran program.
- e. Alokasi anggaran cukup stabil untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan program secara berkelanjutan.
- f. Staf administrasi dan administrasi yang diperlukan, serta tenaga pendidik, disediakan untuk mencapai tujuan program. Para staf ini diberikan otonomi dan kesempatan yang cukup untuk berkontribusi dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi program.
- g. Terlepas dari cara mengajar (di kelas, jarak jauh, pendidikan campuran, desentralisasi dan/atau pendidikan berbasis internet), terdapat penyediaan infrastruktur yang memadai, termasuk ruang kelas, komputer, teks, peralatan audio-visual, sumber daya masyarakat untuk pendidikan praktik, dan instruksi dan pengawasan di tempat untuk memfasilitasi pencapaian tujuan inti atau misi, sasaran program dan hasil yang diharapkan.
- h. Pembelajaran berbasis internet tidak dapat sepenuhnya menggantikan ruang untuk pengajaran tatap muka, pembelajaran praktik dan dialog. Ruang tatap muka sangat penting untuk pendidikan pekerjaan sosial yang menyeluruh dan oleh karena itu tidak tergantikan.

¹ Tergantung pada pengaturannya, gelar lain dapat digunakan untuk menunjukkan kepemimpinan administratif.

Program-program studi Pekerjaan Sosial cenderung kompleks secara administratif dan menuntut sumber daya karena sintesis elemen-elemen berbasis teori, penelitian dan praktik, termasuk pelatihan relasional dan interaksi pengguna layanan. Oleh karena itu, Sekolah dapat *beraspirasi* untuk mencapai:

- i. Fasilitas fisik yang memadai, termasuk ruang kelas, kantor untuk para pengajar dan staf administrasi, serta ruang untuk pertemuan mahasiswa, fakultas, dan penghubung lapangan.
- j. Peralatan yang memadai yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau misi inti sekolah dan tujuan program.
- k. Kualitas program pendidikan yang tinggi, apa pun cara penyampaiannya. Dalam hal pengajaran jarak jauh, moda campuran, desentralisasi dan/atau berbasis internet, mekanisme untuk pengajaran dan pengawasan berbasis lokal harus diterapkan, terutama yang berkaitan dengan komponen praktik program.
- l. Sumber daya yang baik di tempat dan perpustakaan online, lingkungan pengetahuan dan penelitian, dan, jika memungkinkan, sumber daya internet, semuanya diperlukan untuk mencapai tujuan program.
- m. Akses ke perpustakaan internasional, layanan roaming internasional (misalnya, EduRoam), jurnal elektronik, dan basis data.

3. Kurikulum

Berkenaan dengan standar mengenai kurikulum program, sekolah *harus* secara konsisten memastikan hal-hal berikut:

- a. Kurikulum dan metode pengajaran konsisten dengan tujuan program sekolah, hasil yang diharapkan, dan pernyataan misinya.
- b. Adanya mekanisme yang jelas untuk pelaksanaan dan evaluasi organisasi terhadap komponen teori dan pendidikan lapangan dari program ini.
- c. Perhatian khusus untuk melakukan peninjauan dan pengembangan kurikulum secara terus-menerus.
- d. Pedoman yang jelas untuk penggunaan teknologi yang etis dalam praktik, penyampaian kurikulum, pembelajaran jarak jauh/blended learning, analisis big data, dan keterlibatan dengan media sosial

Sekolah harus selalu *beraspirasi untuk* untuk mengembangkan kurikulum yang:

- e. Membantu mahasiswa pekerjaan sosial untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan sikap penalaran ilmiah, keterbukaan terhadap pengalaman dan paradigma baru serta komitmen terhadap pembelajaran seumur hidup.
- f. Memiliki durasi² dan kesempatan belajar yang cukup untuk memastikan bahwa siswa dipersiapkan untuk praktik profesional. Siswa dan pendidik diberikan ruang dan waktu yang cukup untuk mematuhi standar minimum yang dijelaskan di sini.
- g. Mencerminkan kebutuhan, nilai, dan budaya dari populasi yang relevan.

² Dalam banyak konteks, kualifikasi profesional pertama (atau gelar sarjana muda dalam pekerjaan sosial) dapat diselesaikan dalam waktu tiga atau empat tahun studi penuh waktu, meskipun jumlah konten mata kuliah non-sosial yang disertakan dapat bervariasi.

- h. Mendasarkan diri pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pengupayaan pencapaian keadilan.

4. Kurikulum Inti

Program pendidikan pekerjaan sosial bervariasi berdasarkan konteks ekonomi dan politik, pengaturan praktik, populasi yang dilayani, jenis masalah pribadi dan sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan yang ditangani, serta teori dan pendekatan praktik yang digunakan. Namun demikian, ada beberapa kurikulum inti yang dapat diterapkan secara universal.

Dengan demikian, sekolah *harus memastikan* bahwa siswa pekerjaan sosial, pada akhir kualifikasi profesional Pekerjaan Sosial pertama mereka³, telah memiliki paparan yang cukup/sesuai dengan yang dibutuhkan dan relevan dengan kurikulum inti berikut ini yang diorganisir ke dalam komponen konseptual yang luas berikut ini:

- a. *Pekerjaan Sosial dalam Konteks: mengacu pada pengetahuan yang lebih luas yang diperlukan untuk memahami secara kritis kekuatan politik, sosio-legal, budaya, dan sejarah yang telah membentuk pekerjaan sosial.*
- b. *Pekerjaan Sosial dalam Praktik: mengacu pada seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas yang diperlukan untuk merancang dan memberikan intervensi yang efektif, etis, dan kompeten.*

Kedua komponen konseptual di atas saling bergantung, dinamis, dan harus dipertimbangkan secara bersamaan.

Pekerjaan Sosial Dalam Konteks

Sehubungan dengan Pekerjaan Sosial dalam Konteks, program pendidikan *harus* mencakup hal-hal berikut:

1. Pemahaman kritis tentang bagaimana ketidakcukupan sosio-struktural, diskriminasi, penindasan, dan ketidakadilan sosial, politik, lingkungan, dan ekonomi berdampak pada pembangunan manusia di semua tingkatan, termasuk global, harus dipertimbangkan.
2. Pengetahuan tentang bagaimana tradisi, budaya, kepercayaan, agama, dan adat istiadat mempengaruhi perkembangan manusia di sepanjang rentang kehidupan, termasuk bagaimana hal ini dapat menjadi sumber daya dan atau hambatan bagi pertumbuhan.
3. Pengetahuan tentang teori-teori pekerjaan sosial, ilmu sosial, humaniora dan pengetahuan adat
4. Pemahaman kritis tentang asal-usul dan tujuan pekerjaan sosial.
5. Pemahaman kritis terhadap ketidakadilan historis yang mempengaruhi komunitas pengguna layanan dan peran pekerja sosial dalam mengatasinya.
6. Pengetahuan yang memadai tentang pekerjaan dan profesi terkait untuk memfasilitasi kolaborasi antarprofesi dan kerja sama tim.
7. Pengetahuan tentang kebijakan kesejahteraan sosial (atau kesenjangan kebijakan yang ada), layanan dan hukum di tingkat lokal, nasional dan/atau regional/internasional

³ Dalam banyak konteks, kualifikasi profesional pertama (atau gelar sarjana muda dalam pekerjaan sosial) dapat diselesaikan dalam waktu tiga atau empat tahun studi penuh waktu, meskipun jumlah konten mata kuliah non-sosial yang disertakan dapat bervariasi.

8. Pemahaman peran pekerjaan sosial dalam perencanaan, implementasi, evaluasi dan proses perubahan sosial.
9. Pengetahuan tentang - hak asasi manusia, gerakan sosial dan keterkaitannya dengan isu-isu yang berhubungan dengan kelas, gender, dan etnis/ras.
10. Pengetahuan tentang perjanjian internasional yang relevan, hukum dan peraturan, dan standar global seperti Tujuan Pembangunan Sosial.
11. Pemahaman kritis tentang dampak degradasi lingkungan terhadap kesejahteraan masyarakat dan promosi Keadilan Lingkungan.
12. Pemusatan perhatian pada kesetaraan gender
13. Pemahaman tentang penyebab struktural dan dampak kekerasan berbasis gender
14. Penekanan pada isu-isu struktural yang mempengaruhi populasi yang terpinggirkan, rentan, dan minoritas.
15. Pemahaman tentang asumsi, identifikasi, dan pengakuan atas kekuatan dan potensi semua manusia.
16. Pengetahuan tentang Kontribusi Pekerjaan Sosial dalam mempromosikan perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan di masyarakat yang terkena dampak konflik politik/etnis dan kekerasan.

Pekerjaan Sosial dalam Praktik

Sehubungan dengan Pekerjaan Sosial Dalam Praktik, program pendidikan *harus* mempersiapkan mahasiswa untuk:

1. Menerapkan pengetahuan tentang perilaku dan perkembangan manusia di seluruh rentang kehidupan.
2. Memahami bagaimana faktor penentu sosial berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (mental, fisik, emosional dan spiritual).
3. Mempromosikan hubungan yang sehat, kohesif, dan tidak menindas di antara orang-orang dan antara orang-orang dan organisasi di semua tingkatan - individu, keluarga, kelompok, program, organisasi, komunitas.
4. Memfasilitasi dan mengadvokasi penyertaan suara-suara yang berbeda, terutama suara-suara dari kelompok-kelompok yang mengalami marjinalisasi dan pengucilan.
5. Memahami hubungan antara pengalaman hidup pribadi dan sistem nilai pribadi dengan praktik pekerjaan sosial.
6. Mengintegrasikan teori, etika, penelitian/pengetahuan dalam praktik.
7. Memiliki keterampilan praktik yang memadai dalam pengkajian, pembangunan hubungan, pemberdayaan dan proses membantu untuk mencapai tujuan yang diidentifikasi dari program dan memenuhi kewajiban profesional kepada pengguna layanan. Program ini dapat mempersiapkan praktisi untuk melayani tujuan-tujuan, termasuk memberikan dukungan sosial, dan terlibat dalam intervensi perkembangan, perlindungan, pencegahan dan/atau terapeutik - tergantung pada fokus khusus program atau orientasi praktik profesional.
8. Menerapkan intervensi pekerjaan sosial yang didasari oleh prinsip-prinsip, pengetahuan, dan keterampilan yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan manusia dan potensi semua orang
9. Melibatkan diri dalam analisis kritis tentang bagaimana kebijakan dan program sosial mempromosikan atau melanggar hak asasi manusia dan keadilan

10. Menggunakan pembangunan perdamaian, aktivisme tanpa kekerasan dan advokasi berbasis hak asasi manusia sebagai metode intervensi.
 11. Menggunakan pendekatan berbasis pemecahan masalah dan kekuatan.
 12. Mengembangkan diri menjadi praktisi yang reflektif secara kritis.
 13. Menerapkan kode etik pekerjaan sosial nasional, regional dan/atau internasional dan penerapannya pada realitas yang sesuai dengan konteksnya
 14. Menjadikan diri mampu untuk menangani dan berkolaborasi dengan orang lain terkait dengan kompleksitas, seluk-beluk, multi-dimensi, etika, hukum, dan aspek-aspek dialogis dari kekuasaan.
-

Praktik Lapangan (Penempatan)⁴

Praktik Lapangan merupakan komponen penting dalam pendidikan pekerjaan sosial profesional. Oleh karena itu, pendidikan praktik harus diintegrasikan dengan baik ke dalam kurikulum dalam mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan, nilai, dan keterampilan untuk praktik yang etis, kompeten, dan efektif.

Praktik Lapangan *harus* memadai dalam hal durasi dan kompleksitas tugas serta kesempatan belajar untuk memastikan bahwa siswa dipersiapkan untuk praktik profesional. Oleh karena itu, sekolah juga harus memastikan:

- a. Panduan pendidikan praktik yang dikembangkan dengan baik dan komprehensif yang merinci standar, prosedur, standar/kriteria penilaian, dan ekspektasi penempatan praktik harus tersedia bagi mahasiswa, supervisor penempatan lapangan, dan instruktur penempatan lapangan.
- b. Kebijakan dan prosedur atau pedoman yang jelas dan transparan untuk:
 - 1) pemilihan lokasi penempatan praktik;
 - 2) mencocokkan siswa dengan lokasi penempatan;
 - 3) penempatan siswa;
 - 4) pengawasan terhadap siswa;
 - 5) koordinasi dengan program tersebut;
 - 6) mendukung siswa dan instruktur lapangan;
 - 7) memantau kemajuan siswa dan mengevaluasi kinerja siswa di lapangan; dan
 - 8) mengevaluasi kinerja pengaturan pendidikan praktik.
- c. Penunjukan supervisor atau instruktur praktik yang memenuhi syarat dan berpengalaman, sebagaimana ditentukan oleh status perkembangan profesi pekerjaan sosial di negara tertentu, dan penyediaan orientasi untuk supervisor atau instruktur praktik.
- d. Penyediaan orientasi dan dukungan berkelanjutan, termasuk pelatihan dan pendidikan untuk para pengawas praktik.
- e. Memastikan bahwa sumber daya yang memadai dan sesuai, untuk memenuhi kebutuhan komponen praktik program, tersedia.
- f. Kebijakan untuk mengikutsertakan populasi yang terpinggirkan, serta akomodasi dan penyesuaian yang wajar bagi para penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
- g. Komponen pendidikan praktik memberikan umpan balik yang berkelanjutan, tepat waktu dan sesuai dengan perkembangan siswa.

⁴ Sering juga digunakan istilah "pendidikan lapangan" dan "instruksi lapangan".

Sekolah-sekolah juga harus *memiliki aspirasi*:

- h. Menciptakan peluang praktik lapangan yang sesuai dengan setidaknya 25% dari keseluruhan aktivitas pendidikan dalam program (dihitung dalam bentuk kredit, hari, atau jam).
- i. Memupuk kemitraan yang berharga antara lembaga pendidikan dan agensi (jika ada) dan pengguna layanan dalam pengambilan keputusan mengenai pendidikan praktik dan evaluasi kinerja siswa.
- j. Jika program ini terlibat dalam praktik lapangan internasional, standar tambahan, pedoman dan dukungan harus diberikan kepada siswa yang ditempatkan di luar negeri dan lembaga di negara penerima. Selain itu, program ini harus memiliki mekanisme untuk memfasilitasi pembelajaran timbal balik, pertukaran pengetahuan yang tulus.

5. Kegiatan Penelitian dan Keilmuan

Sebagai sebuah disiplin akademis, pekerjaan sosial didukung oleh teori-teori pekerjaan sosial, ilmu sosial, humaniora, dan pengetahuan setempat atau lokal. Pengetahuan dan keilmuan pekerjaan sosial dihasilkan melalui berbagai sumber, termasuk penyedia pendidikan, organisasi penelitian, peneliti independen, komunitas lokal, organisasi pekerjaan sosial, praktisi, dan pengguna layanan.

Semua penyelenggara pendidikan harus *beraspirasi untuk memberikan kontribusi* pada pengembangan, pemahaman kritis dan generasi beasiswa pekerjaan sosial. Hal ini dapat dicapai, kapan dan di mana saja, melalui penggabungan strategi penelitian dan beasiswa, termasuk:

- a. Penekanan pada proses produksi pengetahuan dalam pekerjaan sosial, dengan menjelaskan berbagai pendekatan metodologis dalam disiplin ilmu ini dan bagaimana hal ini berkembang.
- b. Penghargaan terhadap metode yang ketat dan berbagai yang digunakan oleh pekerja sosial untuk menilai kredibilitas, transferabilitas, reliabilitas konfirmabilitas, dan validitas informasi.
- c. Pengajaran yang didasari oleh bukti-bukti terkini, valid, dan dapat diandalkan.
- d. Pemberian kesempatan bagi mahasiswa untuk menilai secara kritis temuan penelitian dan memperoleh keterampilan penelitian.
- e. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.
- f. Pemberian dukungan pada mahasiswa untuk memperoleh dan mengembangkan keterampilan evaluasi program/praktek, termasuk bermitra dengan mereka dalam pekerjaan tersebut.

Orang



Program-program Pekerjaan Sosial terdiri dari komunitas intelektual, sosial, dan material yang dinamis. Komunitas ini menyatukan para mahasiswa, pendidik, administrator, dan pengguna layanan yang bersatu dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesempatan belajar, pengembangan profesional dan pribadi.

1. Pendidik

Berkenaan dengan pendidik pekerjaan sosial⁵, sekolah dan program harus memastikan:

- a. Penyediaan tenaga pendidik, dalam jumlah dan rentang keahlian yang memadai, yang memiliki kualifikasi yang sesuai, termasuk pengalaman praktik dan penelitian dalam bidang Pekerjaan Sosial; semua ditentukan oleh status perkembangan profesi pekerjaan sosial di negara tertentu.
- b. Keterwakilan dan pelibatan pendidik dalam proses pengambilan keputusan di sekolah atau program yang terkait dengan pengembangan tujuan atau misi inti program, dalam perumusan tujuan, desain kurikulum, dan hasil yang diharapkan dari program tersebut.
- c. Pernyataan yang jelas mengenai kebijakan atau preferensi berbasis kesetaraan, dengan mempertimbangkan jenis kelamin, etnis, 'ras', atau bentuk keragaman lainnya dalam perekrutan dan penunjukan anggota staf.
- d. Kebijakan mengenai perekrutan, pengangkatan dan promosi staf diartikulasikan dengan jelas dan transparan serta sesuai dengan sekolah atau program lain di dalam lembaga pendidikan.
- e. Kebijakan yang sejalan dengan undang-undang ketenagakerjaan nasional dan juga mempertimbangkan pedoman Organisasi Buruh Internasional.
- f. Para pendidik mendapat manfaat dari lingkungan kerja yang kooperatif, suportif, dan produktif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan program.
- g. Kebijakan lembaga mengenai kenaikan pangkat, masa kerja, disiplin dan pemberhentian yang transparan dan jelas. Ketersediaan mekanisme banding dan peninjauan kembali keputusan.
- h. Pembagian beban mengajar dan beban kerja lain yang relevan secara adil dan transparan. Variasi dalam distribusi beban kerja dalam hal pengajaran, beasiswa (termasuk penelitian) dan pelayanan tidak dapat dihindari. Namun, alokasi beban kerja harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kesetaraan dan penghormatan terhadap keterampilan, keahlian, dan bakat pendidik yang berbagai.
- i. Penerapan mekanisme mekanisme yang transparan dan adil tersedia untuk mengatasi dan menyelesaikan perbedaan dan konflik.

Semua Sekolah juga harus *beraspirasi* untuk :

- j. Menyediakan alokasi yang seimbang antara pengajaran, praktikum dan praktik lapangan, supervisi, dan beban kerja administratif, memastikan bahwa ada ruang untuk berkoordinasi dengan semua bentuk beasiswa termasuk peruntukan bagi karya kreatif dan penelitian.

⁵ Terminologi yang berbeda digunakan untuk mewakili dan atau menggambarkan orang-orang yang memberikan pendidikan (yaitu akademisi, fakultas, instruktur, pendidik, guru, tutor, dosen, dll.). Untuk keperluan dokumen ini, kami menggunakan istilah "Pendidik Pekerjaan Sosial"

- k. Terkait keterlibatan pendidik, kualifikasi minimal tingkat Master dalam pekerjaan sosial lebih diutamakan.
- l. Staf mencerminkan etika, nilai-nilai dan prinsip-prinsip profesi pekerjaan sosial dalam pekerjaan mereka atas nama dan dengan mahasiswa dan masyarakat.
- m. Sekolah, jika memungkinkan, memupuk pendekatan interdisipliner. Untuk itu, Sekolah berusaha untuk melibatkan para pendidik dari berbagai disiplin ilmu yang relevan seperti sosiologi, sejarah, ekonomi, statistik, dll.
- n. Setidaknya 50% pendidik harus memiliki kualifikasi pekerjaan sosial, dan modul atau mata kuliah pekerjaan sosial harus diajarkan oleh pendidik dengan kualifikasi Master Pekerjaan Sosial, sesuai dengan status profesi di masing-masing negara.
- o. Sekolah memiliki ketentuan untuk pengembangan profesionalisme berkelanjutan bagi para pendidiknya.

2. Mahasiswa

Sehubungan dengan siswa pekerjaan sosial, Sekolah *harus* memastikan:

- a. Artikulasi yang jelas tentang kriteria dan prosedur penerimaannya. Jika memungkinkan, praktisi dan pengguna layanan harus dilibatkan dalam proses yang relevan.
- b. Non-diskriminasi terhadap mahasiswa berdasarkan ras, warna kulit, budaya, etnis, asal bahasa, agama, orientasi politik, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, status perkawinan, status fungsional, dan status sosial ekonomi.
- c. Kriteria eksplisit untuk evaluasi pendidikan praktik
- d. Prosedur keluhan dan banding yang dapat diakses, dijelaskan dengan jelas kepada semua mahasiswa dan dioperasikan tanpa mengurangi penilaian mahasiswa.
- e. Semua informasi mengenai, penilaian, tujuan dan struktur mata kuliah, hasil pembelajaran, kehadiran di kelas, peraturan ujian, prosedur pengajuan banding dan layanan dukungan mahasiswa harus diartikulasikan dengan jelas dan diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk buku panduan (cetak atau elektronik) di setiap awal tahun akademik.
- f. Memastikan bahwa mahasiswa pekerjaan sosial diberi kesempatan untuk mengembangkan kesadaran diri terkait nilai-nilai pribadi dan budaya, kepercayaan, tradisi, dan bias mereka, serta bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi kemampuan untuk mengembangkan hubungan dengan orang lain dan bekerja dengan kelompok populasi yang beragam.
- g. Memberikan informasi tentang jenis dukungan yang tersedia bagi mahasiswa, termasuk bantuan akademik, keuangan, pekerjaan, dan bantuan pribadi
- h. Mahasiswa harus mengetahui dengan jelas apa saja yang termasuk dalam pelanggaran, termasuk pelanggaran akademik, pelecehan dan diskriminasi, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk mengatasi hal tersebut.

Semua Sekolah juga harus *beraspirasi untuk*:

- i. Kebijakan komprehensif untuk mempertahankan perkuliahan dengan memprioritaskan kesejahteraan mahasiswa.
- j. Pengambilan tindakan positif untuk memastikan penyertaan kelompok minoritas yang kurang terwakili dan/atau kurang terlayani.
- k. Representasi mahasiswa yang demokratis dan berkelanjutan dalam komite dan forum pengambilan keputusan.

3. Pengguna Layanan⁶

Sehubungan dengan keterlibatan pengguna layanan, sekolah *harus*:

- a. Memasukkan hak-hak, pandangan dan kepentingan Pengguna Layanan dan komunitas yang lebih luas yang dilayani dalam operasinya, termasuk pengembangan, implementasi dan penyampaian kurikulum.
- b. Mengembangkan strategi proaktif untuk memfasilitasi keterlibatan Pengguna Layanan dalam semua aspek desain, perencanaan, dan pelaksanaan program studi.
- c. Memastikan penyesuaian yang wajar dilakukan untuk mendukung keterlibatan Pengguna Layanan.

Juga *beraspirasi untuk*:

- d. Menciptakan peluang untuk pengembangan pribadi dan profesional Pengguna Layanan yang terlibat dalam program studi.

⁶ Tergantung pada konteksnya, istilah-istilah lain, termasuk *klien* dan *konstituen masyarakat* digunakan sebagai pengganti *pengguna layanan*.



Profesi

Sekolah Pekerjaan Sosial adalah anggota dari komunitas profesional dan akademis global. Oleh karena itu, mereka harus dapat berkontribusi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan keilmuan, praktik dan pengembangan kebijakan di tingkat nasional dan global. Memelihara, memperluas dan memformalkan hubungan dengan badan-badan perwakilan nasional dan internasional dari profesi pekerjaan sosial merupakan hal yang sangat penting.

1. Pemahaman bersama tentang Profesi

Sekolah *harus* memastikan hal-hal berikut ini:

- a. Definisi pekerjaan sosial yang digunakan dalam konteks proses pendidikan harus sesuai dengan Definisi Global Pekerjaan Sosial yang telah disetujui oleh IAASW dan IFSW, termasuk penerapan pada tataran regional yang mungkin sudah dikembangkan.
- b. Sekolah-sekolah mempertahankan hubungan yang erat dan formal dengan perwakilan dan pemangku kepentingan utama profesi pekerjaan sosial, termasuk regulator dan organisasi profesi dan pendidikan pekerjaan sosial nasional dan regional.
- c. Pendaftaran staf profesional dan mahasiswa pekerjaan sosial (sejauh mahasiswa pekerjaan sosial mengembangkan hubungan kerja dengan orang-orang melalui penempatan praktik) dengan badan-badan pengatur nasional dan/atau regional (baik yang bersifat hukum maupun non-hukum).
- d. Semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan pekerjaan sosial harus secara aktif berusaha untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari komunitas pekerjaan sosial global dalam semangat kemitraan dan solidaritas internasional.

Sekolah-sekolah juga harus memiliki aspirasi untuk:

- e. Memantau tingkat kelayakan kerja mahasiswa dan mendorong mereka untuk secara aktif berpartisipasi dalam komunitas pekerjaan sosial nasional dan global.

2. Etika dan Nilai-nilai

Mengingat pengakuan bahwa nilai-nilai, etika dan prinsip-prinsip pekerjaan sosial adalah komponen inti dari profesi, Sekolah *harus* secara konsisten memastikannya:

- a. Mematuhi Pernyataan Etika Global yang disetujui oleh IAASW dan IFSW.
- b. Mematuhi terhadap Kode Etik Nasional dan Regional.
- c. Mematuhi Definisi Global Pekerjaan Sosial yang telah disetujui oleh IAASW dan IFSW.
- d. Mengartikulasikan tujuan yang jelas sehubungan dengan nilai, prinsip, dan perilaku etis pekerjaan sosial. Memastikan bahwa setiap mahasiswa pekerjaan sosial yang terlibat dalam pendidikan praktik, dan setiap anggota staf akademik, menyadari batasan-batasan praktik profesional dan apa yang mungkin dianggap sebagai perilaku tidak profesional dalam kaitannya dengan kode etik.
- e. Mengambil tindakan yang tepat, masuk akal dan proporsional dalam kaitannya dengan mahasiswa pekerjaan sosial dan staf akademik yang gagal mematuhi kode etik, baik melalui badan pekerjaan sosial yang telah ditetapkan, prosedur yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan, dan/atau melalui mekanisme hukum.

Sekolah-sekolah juga harus memiliki aspirasi untuk:

- f. Menjunjung tinggi, sejauh mungkin dan masuk akal, prinsip-prinsip keadilan restoratif dan bukan retributif dalam mendisiplinkan mahasiswa pekerjaan sosial atau staf akademik yang melanggar kode etik.

3. Kesetaraan dan Keragaman

Berkenaan dengan kesetaraan dan keragaman Sekolah *harus*:

- a. Melakukan upaya bersama dan berkelanjutan untuk memastikan pengayaan pengalaman pendidikan dengan merefleksikan keragaman budaya, etnis, dan bentuk-bentuk keragaman lainnya dalam program dan populasi yang relevan.
- b. Memastikan bahwa pendidik, siswa, dan pengguna layanan diberikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi, ras, etnis, agama, orientasi seksual, dan bentuk keragaman lainnya.
- c. Memastikan bahwa program tersebut memiliki tujuan pembelajaran yang diartikulasikan dengan jelas dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip penghormatan terhadap keragaman budaya dan etnis, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia.
- d. Mengatasi dan menentang perilaku, kebijakan, dan struktur yang rasis, homofobia, seksis, dan diskriminatif lainnya.

Sekolah-sekolah juga harus *memiliki aspirasi untuk*:

- e. Pengakuan dan pengembangan pendidikan dan praktik pekerjaan sosial asli atau lokal yang spesifik dari tradisi dan budaya kelompok etnis dan masyarakat yang berbeda, sejauh tradisi dan budaya tersebut sesuai dengan kode etik dan komitmen hak asasi manusia.

4. Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Keadilan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan adalah pilar fundamental yang mendasari teori, kebijakan dan praktik pekerjaan sosial. Semua Sekolah *harus* melakukannya:

- a. Mempersiapkan siswa untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (seperti yang diartikulasikan dalam International Bill of Rights dan perjanjian hak asasi manusia internasional inti) untuk membingkai pemahaman mereka tentang bagaimana isu-isu sosial saat ini mempengaruhi keadilan sosial, ekonomi dan lingkungan.
- b. Memastikan bahwa siswa mereka memahami pentingnya keadilan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan intervensi yang relevan.
- c. Berkontribusi pada upaya kolektif di dalam dan di luar struktur sekolah untuk mencapai keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan

Mereka juga harus *beraspirasi untuk* :

- d. Mengidentifikasi peluang untuk mendukung pembangunan di tingkat akar rumput dan aksi partisipatif masyarakat untuk memenuhi aspirasi Tujuan Pembangunan Sosial.
- e. Memanfaatkan peluang untuk bertukar pengetahuan, keahlian, dan ide dengan rekan-rekan global untuk mendukung kemajuan pendidikan pekerjaan sosial yang bebas dari pengaruh kolonial.

- f. Menciptakan platform bagi pekerja sosial masyarakat adat untuk membentuk kurikulum dan kursus yang relevan.